

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

(Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2016)

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

DENI APRILIANTO
NIM 135030400111066



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

MOTTO

Bahagiakan Kedua Orang Tuamu Selagi Masih Mendoakanmu

(Deni Aprilianto)

Knowledge of man is not neutral in its import; it grants power over man as well

(Robert Fisdriks, 1970)



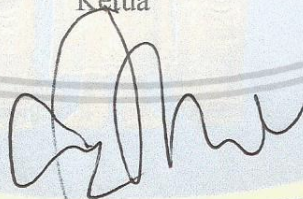
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan. Komite Audit
Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Pada
Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun
2013-2016)

Disusun oleh : Deni Aprilianto
NIM : 135030400111066
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 11 Januari 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, AK,

NIK. 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijayaa, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Februari 2018

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Deni Aprilianto

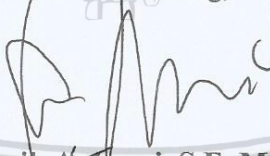
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2016)

Dan dinyatakan

LULUS

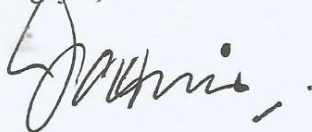
MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing,



Astri Warih Anjarwi, S.E, MSA, Ak
NIK. 20130487 0316 2 001

Penguji I,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Penguji II,



Dessanti Putri Sekti Ari, S.E, MSA, AK
NIP. 19881223 201504 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 11 januari 2017



Deni Aprilianto
(135030400111066)

RINGKASAN

Deni Aprilianto, 2018, **Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan** (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2016). Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, AK, 68 halaman + xiii.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Studi dilakukan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah populasi 43 perusahaan perbankan yang dijadikan sampel 30 perusahaan sehingga total jumlah sampel penelitian sebanyak 120 data. Metode analisis menggunakan analisis linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi sebesar 0,047. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi sebesar 0,299. Secara simultan kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi sebesar 0,40.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Penghindaran pajak

SUMMARY

Deni Aprilianto, 2018 **Effect of Institutional Ownership and Audit Committee Against Corporate Tax Avoidance** (Studies in Banking Sector Listed on the Stock Exchange for the Period of 2013-2016). Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, AK, 68 pages + xiii.

This study aimed to analyze the influence of institutional ownership and audit committees on corporate tax Avoidance. Studies carried out in the banking sector listed on the Stock Exchange the period of 2013-2016. The sampling technique used *purposive sampling*. Total population 43 banking companies sample 30 companies bringing the total number of research samples were 120 data. The method of analysis using multiple linear analysis.

Based on the analysis that has been done on these studies show that partially institutional ownership have a significant influence on the significance of tax avoidance amounting to 0,047. The audit committee does not have a significant influence on the significance of tax avoidance amounting to 0,299. Simultaneously, institutional ownership and influence significantly the audit committee on tax evasion with a significance of 0.40.

Keywords: Institutional Ownership, Audit Committee, and Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN**”,

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Keluarga saya terutama orang tua tercinta Ir. Hariyadi dan Dr. Titik Mildawati, SE, M.Si., Ak, CA serta saudara saya Nurmanadana Ramadhan dan Dedi Setiawan yang tiada henti selalu memberikan dukungan kepada peneliti dengan memberi bimbingan, kasih sayang, dan doa,
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mochammad Al Musadieg, Dr, MBA selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,

5. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, AK, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberi bimbingan serta arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti selama peneliti menempuh pendidikan di prodi Administrasi Perpajakan
7. Bapak ibu dosen jurusan administrasi bisnis yang sudah mengajarkan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di prodi Administrasi Perpajakan,
8. Teman angkatan 2013 yang telah memberikan doa serta dukungan kepada peneliti,
9. Teman Poker Embongan yang selalu memberi semangat dan bersedia menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

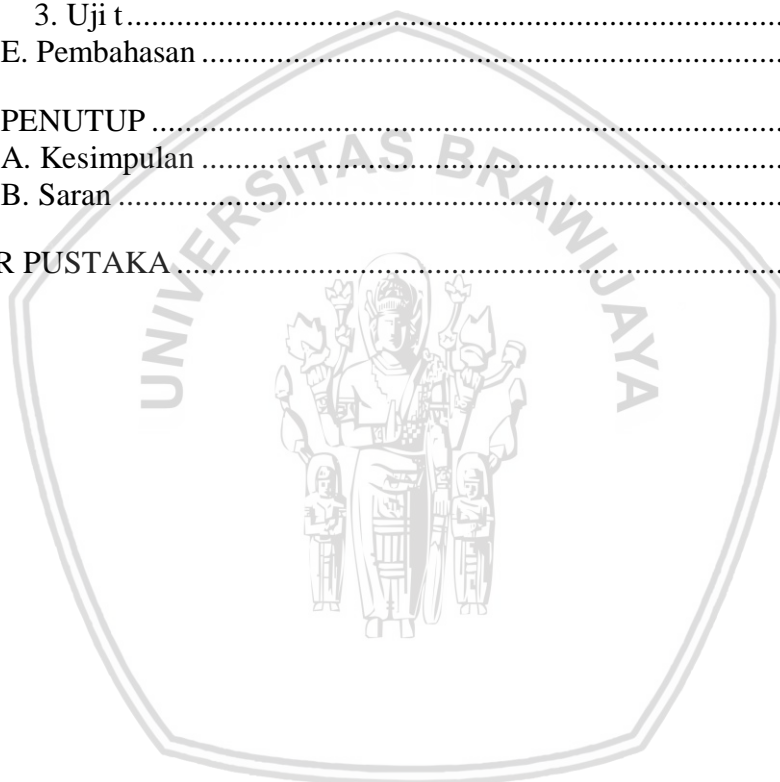
Malang, 11 Januari 2018

Deni Aprilianto

DAFTAR ISI

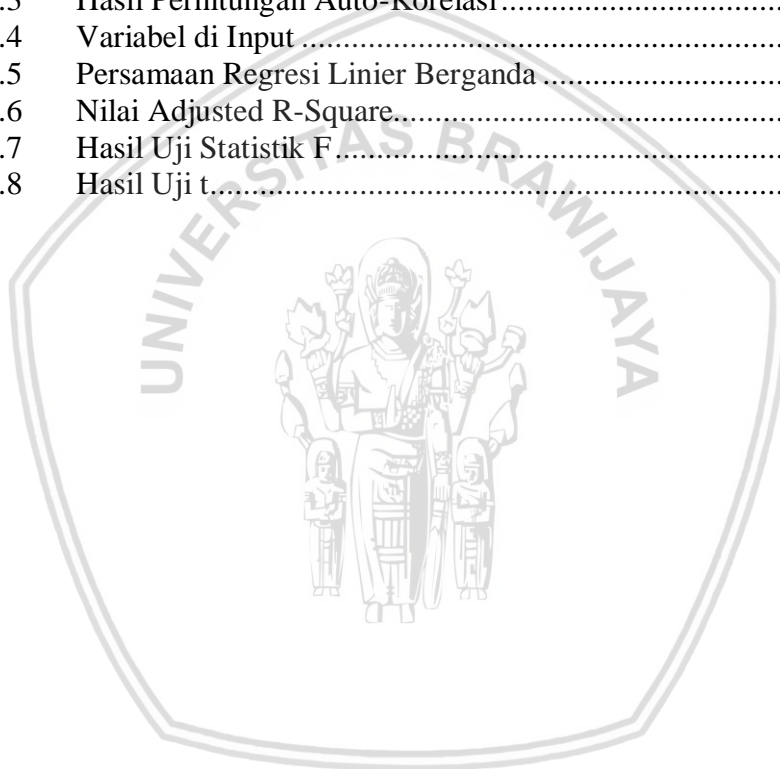
	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Penghindaran Pajak.....	11
C. Kepemilikan Institusional	12
D. Komite Audit.....	14
E. Hipotesis	17
F. Kerangka Pemikiran	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 25
A. Jenis Penelitian	25
B. Variabel dan Pengukuran	26
1. Variabel Dependen	26
2. Variabel Independen.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
1. Populasi.....	28
2. Sampel	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Jenis Data.....	30
2. Sumber Data.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
1. Analisis Deskriptif.....	32
2. Uji Asumsi Klasik	32
3. Analisis Regresi Linier Berganda	35
4. Uji Hipotesis	36

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	38
A. Analisis Deskriptif.....	38
B. Uji Asumsi Klasik	40
1. Uji normalitas data	40
2. Uji Multikolineritas	41
3. Uji Autokorelasi	42
4. Uji Heterokedastisitas.....	44
C. Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
D. Uji Hipotesis.....	47
1. Koefisien Determinasi (R^2)	47
2. Uji Kelayakan Model (Uji F)	48
3. Uji t.....	49
E. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR TABEL

No	Tabel	Judul	Halaman
1	2.1	Penelitian Terdahulu	8
2	3.1	Pemilihan Sampel	29
3	3.2	Daftar Perusahaan Sampel.....	31
4	3.3	Kriteria Pengujian Durbin-Watson	34
5	4.1	Analisis Deskriptif	38
6	4.2	Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
7	4.3	Hasil Perhitungan Auto-Korelasi.....	43
8	4.4	Variabel di Input	44
9	4.5	Persamaan Regresi Linier Berganda	46
10	4.6	Nilai Adjusted R-Square.....	47
11	4.7	Hasil Uji Statistik F	49
12	4.8	Hasil Uji t.....	50



DAFTAR GAMBAR

No	Tabel	Judul	Halaman
1	2.1	Kerangka Pemikiran.....	24
2	4.1	Grafik P-Plots	41
3	4.2	Grafik Scatterplot.....	45
.			



DAFTAR LAMPIRAN

No	Tabel	Judul	Halaman
1	1	Sampel Data 2016	61
2	2	Sampel Data 2015	62
3	3	Sampel Data 2014	63
4	4	Sampel Data 2013	64
5	5	Output SPSS Analisis Deskriptif	65
6	6	Output SPSS Grafik P-Plots	65
7	7	Output SPSS <i>Coefficient</i>	66
8	8	Output SPSS <i>Model Summary</i>	66
9	9	Output SPSS Variabel input	66
10	10	Output SPSS Scatterplot.....	67
11	11	Output SPSS Anova	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara “legal” menekan biaya pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Menurut Anderson (Zain, 2008), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan. Ketika akan melakukan penghindaran pajak perusahaan diperlukan sebuah perencanaan atau strategi dengan memanfaatkan celah potongan/keringanan dan pengecualian yang diperkenankan dalam ketentuan umum perpajakan, ataupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar peraturan, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum dan “sah”, meski perilaku ini tentu akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam satu dekade ini, terdapat fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan perbankan, yaitu pada bank *Standard Chartered Plc (Stanchart)* dan HSBC. Dikutip dari detik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan kasus transfer Rp 19 triliun melalui *Standard Chartered Plc (Stanchart)* tidak

melibatkan 1 nasabah, namun 81 nasabah warga negara Indonesia (WNI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkoordinasi dengan Pusat pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti kasus transfer dana sekitar Rp 18,9 triliun atau 1,4 miliar dollar AS. Kasus transfer dana dari Guernsey, Wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Kasus yang sedang ditangani otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah Indonesia ini diduga terkait dengan militer Indonesia. Terkait kasus ini, OJK mengatakan sebenarnya regulator telah mempunyai mekanisme pengawasan. Menurut OJK, jika ada masalah terkait sistem keuangan maka regulator terkait akan melakukan penelusuran. *Bloomberg* melaporkan bahwa sejumlah klien dari Indonesia, yang sebagian di antaranya terkait dengan institusi militer, melakukan transfer senilai total 1,4 miliar dollar AS dari Guernsey ke Singapura di akhir 2015, atau sebulan sebelum Guernsey mengadopsi peraturan pertukaran data perpajakan global atau *Common Reporting Standard*.

Selain itu fenomena penghindaran pajak terjadi pada 2015. Dikutip dari kompas, bank terbesar kedua di dunia HSBC tengah dibelit kasus penghindaran pajak. Dalam sebuah dokumen rahasia, HSBC disebut menyarankan kepada para nasabah kaya untuk menghindari pajak. Mengutip kantor berita BBC, Senin (23/2/2015), ada 106.000 klien di 203 negara yang diduga terkait penghindaran pajak senilai US\$ 118 miliar atau lebih dari Rp1.400 triliun.

Penghindaran pajak perlu dilakukan pengawasan agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham dapat menjadi pengawas kinerja pengelola perusahaan termasuk kebijakan perpajakan. Pemegang saham

dalam hal ini adalah kepemilikan institusional, memberikan peran penting terkait dengan penghindaran pajak. Dimana kepemilikan institusional dijalankan oleh investor aktif. Investor aktif dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kemampuan manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dibatasi oleh efektivitas dari pengawasan yang dilakukan oleh para pemegang saham khususnya investor institusional. Para investor institusional memiliki kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan serta mempengaruhi para manajemen dan tindakan oportunistik manajemen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktofian (2015) mengatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pernyataan berbeda diungkapkan oleh Cahyono (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak membutuhkan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Keberadaan komite audit berperan penting dalam memberikan informasi kepada komisaris untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. Komite audit menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan. Berdasarkan KEP-339/BEJ/07-2001, mengharuskan setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit. Komite audit memiliki tugas utama yaitu untuk memberikan opini profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dewan komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang

berkaitan dengan dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa opini komite audit mempengaruhi dewan komisaris dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktofian (2015) mengatakan bahwa proporsi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pernyataan berbeda diungkapkan oleh Effendi (2017) bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Skripsi ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian mulai dari tahun 2013-2016. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan adalah karena menurut data dari Kementerian Keuangan, potensi pajak dari sektor perbankan sangat besar, karena perkembangan profitabilitas dalam perusahaan keuangan setiap tahun terus tumbuh. Berdasarkan data OJK dalam statistik perbankan Indonesia, laba perbankan 2013 tembus Rp106 triliun, tumbuh 14,95 persen dibandingkan tahun 2012 dengan laba sebesar Rp 92,83 triliun. Namun besaran dan perkembangan laba sektor finansial belum diimbangi dengan kenaikan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, penulis akan mencari tahu pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit diperusahan guna pengambilan keputusan memaksimalkan laba dengan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1).Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- (2).Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah :

- (1).Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- (2).Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

Kontribusi Praktis

Sebagai masukan bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit penghindaran pajak perusahaan. Dengan berbagai hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris

sehingga menambah keyakinan akan kegunaan hasil penelitian tersebut untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

Kontribusi Teoritis

1. Sebagai masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit penghindaran pajak perusahaan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki Sistematika Pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang dipakai pada penelitian yaitu definisi dari masing-masing variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang dimana teori tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian serta kerangka berpikir

BAB III Metode Penelitian

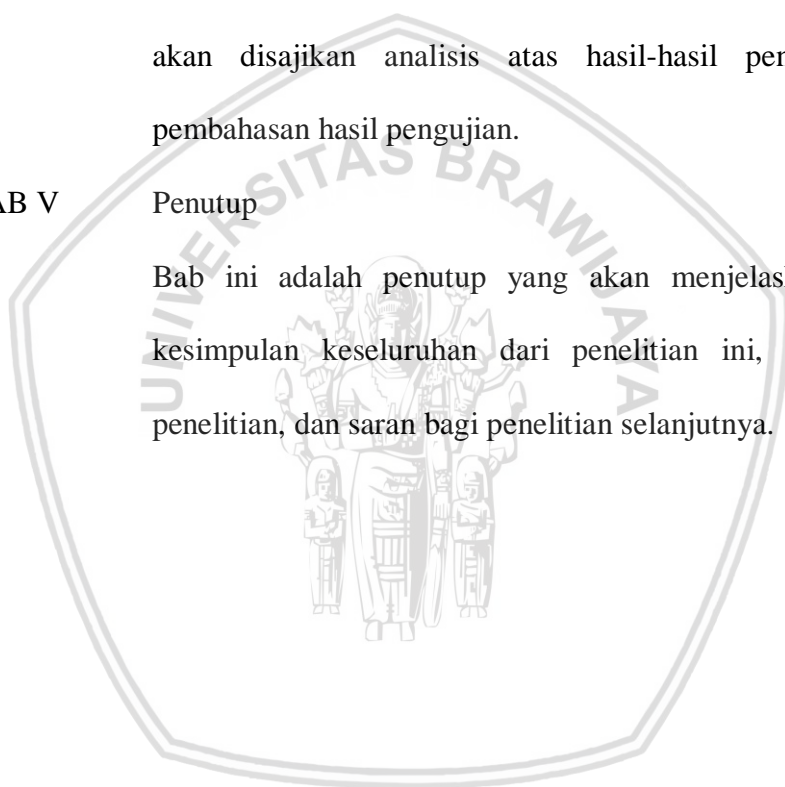
Berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan objek penelitian, analisis data, serta akan disajikan analisis atas hasil-hasil pengujian dan pembahasan hasil pengujian.

BAB V Penutup

Bab ini adalah penutup yang akan menjelaskan tentang kesimpulan keseluruhan dari penelitian ini, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam penulisan penelitian ini tidak terlepas dari kajian dari penelitian terdahulu yang tentunya berhubungan dengan judul penelitian ini. Penelitian sebelumnya memberikan referensi akan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian. Selain itu dapat dijadikan acuan dalam melakukan penulisan tentang pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit penghindaran pajak perusahaan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis
1.	Annisa (2012)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance	1. Kepemilikan institusional. 2. Prosentase dewan komisaris independen. 3. Jumlah dewan komisaris. 4. Jumlah komite audit. 5. Kualitas audit	Analisi Regresi Linear Berganda
2.	Oktafian (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Kepemilikan institusional 2. Dewan komisaris independen 3. Proporsi kepemilikan manajerial 4. Proporsi komite audit	Analisi Regresi Linear Berganda

3.	Cahyono (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	1. Jumlah Komite Audit 2. Kepemilikan Institusional 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 4. Ukuran Perusahaan 5. Leverage 6. Profitabilitas	Analisi Regresi Linear Berganda
4.	Effendi (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	1. Dewan komisaris independen 2. Komite audit 3. Kualitas audit	Analisi Regresi Linear Berganda

Uraian:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012), tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan, tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan terbukti terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan dan terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance* perusahaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini adalah studi dilakukan pada tahun 2008 dan ada variabel dewan komisaris serta kualitas audit.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktafian (2015) menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini adalah melakukan studi pada tahun 2009-2013.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini adalah melakukan studi pada tahun 2011-2013.
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada pengukuran variabel dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini adalah melakukan studi pada tahun 2013-2015.

B. Penghindaran Pajak

Setiap perusahaan selalu ingin memaksimalkan pendapatan laba yang tinggi dan menekan biaya yang harus dikeluarkan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat pada undang undang dan peraturan perpajakan. Menurut Pohan (2009) penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang.

Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk (Darussalam, 2009):

- (1). *Substantive tax planning* yang terdiri dari: (i) memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan; (ii) memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan Perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan; (iii) memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.

(2). *Formal tax planning*, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Pemerintah sudah berupaya untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang terjadi saat ini. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 sudah dikenal peraturan anti penghindaran pajak, akan tetapi ketentuan Pasal 18 tersebut tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak karena semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyusun dan melakukan perbaikan pada undang-undang perpajakan di Indonesia untuk mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak sepenuhnya dianggap legal.

C. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi, dengan kata lain kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Menurut Damayanti (2016)

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank.

Menurut Bushee (Oktofian, 2015), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Hal ini akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Menurut Jensen (Windiarti, 2016), kepemilikan institusional memiliki peranan meminimalisir konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham lainnya. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Selain itu kepemilikan institusional akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak manajer, karena pihak investor institusional memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang strategis. Baik itu keputusan yang sejalan dengan tujuan perusahaan maupun tidak. Sehingga pihak pemegang saham institusional akan mempengaruhi keputusan dalam meningkatkan laba, karena dianggap lebih ahli dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

D. Komite Audit

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Hal serupa disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”), Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Menurut Pamudji (Reza, 2012), komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dan manajer dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan

tercatat dan pihak ekstern lain yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Peran utama dan tanggung jawab komite audit menurut Solomon (2010) yaitu:

- (1).mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan.
- (2).melakukan review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan.
- (3).mengawasi dan melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal.
- (4).mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas auditor eksternal. serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non-audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab komite audit sebagai berikut:

- (1).melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (2).melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

- (3).memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- (4).memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- (5).melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (6).melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- (7).menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (8).menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (9).menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

E. Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Diantaranya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi keputusan pihak komisaris dan manajer dalam melakukan penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional dianggap memiliki keahlian dibandingkan pemegang saham non institusional. Hal ini disebabkan oleh kepentingan pemegang saham yaitu kepemilikan institusional yang menginginkan keuntungan laba yang besar, sehingga semakin besar presentase kepemilikan institusional akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Menurut Cahyono (2016) terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti kepentingan pihak pemegang saham institusional yang mengharapkan laba yang besar. Hal ini menuntut pihak manajer untuk meminimalkan pengeluaran kas perusahaan dengan salah satu caranya adalah melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh instansi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham institusional dinilai lebih ahli dibandingkan pemegang saham lainnya sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan dapat mempengaruhi manajer. Pemegang

saham institusional memiliki hak suara, dan dapat memaksa manajer untuk melakukan peluang penghindaran pajak. Hasil penelitian Cahyono (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Penelitian Dewi (2015) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional dan penelitian Dewi (2014) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusi kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional. Sedangkan, hasil penelitian Ngadiman (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus kepada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Ngadiman (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional merupakan

kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan.

Sementara menurut Khurana (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H₁: kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa komite audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tugas komite audit adalah membantu tugas komisaris dan manajer dalam menjalankan perusahaan dengan memberikan informasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi komisaris dan manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Namun komite audit tidak dapat ikut dalam pengambilan keputusan, hanya mempengaruhi dalam hal opini yang dikeluarkan pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga semakin ahli komite audit pada suatu perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Oktofian (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Keberadaan komite audit berfungsi untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Alasan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak adalah jika semakin sedikit komite audit yang ahli akuntansi atau keuangan dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit akan kurang maksimal sehingga akan menimbulkan peningkatan tindakan penghindaran pajak. Selain itu kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan

perusahaan yang menimbulkan penghindaran pajak tanpa pengawasan. Keahlian akuntansi atau keuangan juga akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil dalam penghindaran pajak. Dibutuhkan keahlian akuntansi atau keuangan, perpajakan untuk dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan yang berlaku agar menghindari resiko terdeteksi.

Dalam penelitian Swingly (2015) sejak direkomendasikannya *Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Hasil penelitian Swingly (2015) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena dewan komisaris memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit. Nandasari (2015) memperoleh hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena seberapa banyaknya komite audit yang berasal dari luar dalam perusahaan tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu Pohan (2009) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik dan pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan

laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Oleh karena itu Pohan (2009) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Sedangkan, hasil penelitian Dewi (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Hasil penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian Annisa (2012) yang membuktikan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan, 2008).

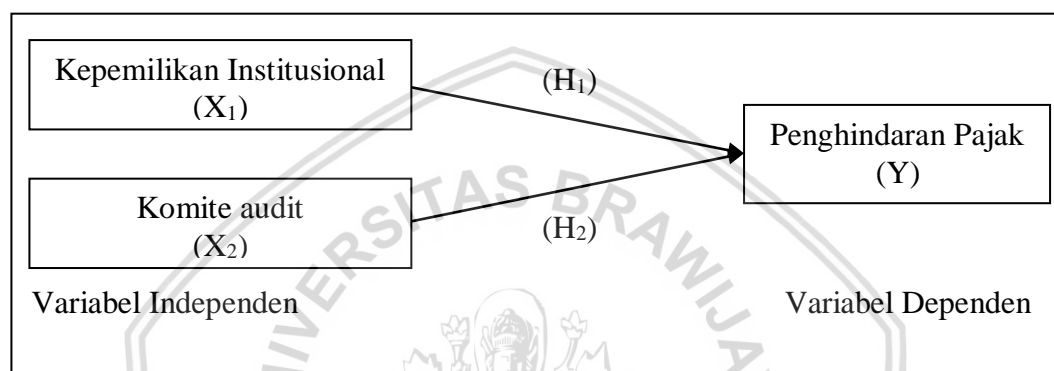
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H₂: komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis yang dijabarkan dalam penelitian ini, dikembangkan model sebagai kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini seperti pada gambar dibawah:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengukur dan mencari fakta suatu variabel terhadap variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

B. Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional variabel adalah suatu pernyataan yang dapat mengartikan atau memberikan makna untuk suatu istilah atau konsep tertentu, sehingga tidak salah dimengerti, dapat diuji, dan ditentukan atau dinyatakan kebenarannya oleh orang lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen menjadi variabel utama peneliti dalam melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Pada penelitian yang dilakukan Reza (2012), untuk mengukur perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Dyreng (2008) menyatakan bahwa *CETR* mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan dalam periode tahunan. *CETR* menjelaskan persentase kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk beban pajak penghasilan perusahaan dengan keseluruhan total pendapatan sebelum pajak. Variabel penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi objek penelitian yang dalam ruang lingkup penelitian diasumsikan tidak mempengaruhi faktor lain. Variabel independen dalam penelitian ini yang digunakan sebagai pengukuran adalah :

a. kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham institusi lain dalam suatu perusahaan baik institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Menurut Budiono (2005), variabel ini dapat diukur menggunakan indikator jumlah persentase saham yang dimiliki institusional lain pada akhir tahun dengan total jumlah saham yang diterbitkan. Variabel kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{kepemilikan saham yang dimiliki institusional lain}}{\sum \text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

b. Komite Audit

Komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan, sehingga keberadaan komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan serta mengontrol manajer dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola perusahaan. Penelitian ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di Indonesia,

yaitu BAPEPAM-LK, yang mengatur bahwa minimal 1 orang dalam komite audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan akan mempengaruhi komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Pada penelitian yang dilakukan Reza (2012), untuk mengukur variabel komite audit terlebih dahulu untuk mencari tahu berapa anggota komite audit yang mempunyai keahlian akuntansi atau keuangan dengan total jumlah anggota komite audit. Variabel komite audit dapat diukur dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\sum \text{anggota yang memiliki latar belakang akuntansi/keuangan}}{\sum \text{anggota komite audit}}$$

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian terdiri dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan perbankan yang telah atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016.

- b. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2013-2016 di dalam website Bursa Efek Indonesia.
- c. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan dalam bentuk rupiah untuk mempermudah perhitungan.
- d. Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai pembayaran pajak, laba sebelum pajak, kepemilikan insitusional, profil dan jumlah komite audit dalam laporan tahunannya periode 2013-2016.
- e. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian untuk mengetahui penghindaran pajak, diperlukan data pembayaran pajak dan laba sebelum pajak.

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah	4 Periode
a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2016	43	172
b. Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi mengenai pembayaran pajak, laba sebelum pajak, kepemilikan insitusional, profil dan jumlah komite audit dalam laporan tahunannya periode 2013-2016.	(3)	(12)
c. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan instusional	(2)	(8)
d. Perusahaan yang mengalami rugi	(7)	(28)
e. Perusahaan yang menjadi data <i>outlayer</i> dan tidak bisa digunakan	(1)	(4)
Jumlah perusahaan	30	
Jumlah sampel		120

Sumber : Bursa Efek Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh selain dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tindakan atau usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Data yang relevan dengan penelitian penulis dilakukan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel selama periode penelitian yaitu 2013-2016. Data sekunder yang dikumpulkan *website* Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id/>.

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
2	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk.
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
4	BBKP	Bank Bukopin Tbk.
5	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
7	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
9	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk.
10	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
11	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
12	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
13	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
14	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
15	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.
16	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
17	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
18	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
19	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.
20	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
21	BVIC	Bank Victoria International Tbk.
22	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk.
23	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.
24	MCOR	Bank Windu Kentjana International Tbk.
25	MEGA	Bank Mega Tbk.
26	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk.
27	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk.
28	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
29	PNBS	Bank Panin Syariah Tbk.
30	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Sumber : Bursa Efek Indonesia

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS 24 sebagai alat untuk menguji data tersebut:

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran umum dari setiap variabel penelitian yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan adalah nilai rata-rata, standar deviasi, variance, maksimum, minimum, kurtosis dan *skewness* (Ghozali, 2013).

2. Uji Asumsi Klasik

Data yang diperoleh dalam penelitian akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar sebelum melakukan pengujian hipotesis. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi linier berganda, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2013) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2013). Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari :

- 1) Besarnya VIF (*Varian Inflation Factor*) dan *Tolereance*
 - a) Nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) < 10
 - b) Nilai TOL (*Tolereance*) $> 0,10$
- 2) Besaran korelasi antar Variabel Independen

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien antar variabel independen haruslah lemah, jika variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik harus bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka

diindikasikan terjadi masalah autokorelasi. Cara mendeteksi adanya autokorelasi salah satunya dengan menggunakan tabel Durbin-Watson.

Uji Durbin –Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel bebas (Ghozali, 2013). Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif dan negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Ghozali (2013)

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yanglain (Ghozali, 2013). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. apabila varian residual berbeda. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini, pengujian menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized (Ghozali, 2013).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2013).

. Analisis regresi adalah metode statistika yang mendeskripsikan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Analisis dengan menggunakan linier berganda digunakan untuk menguji suatu variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut :

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KA + e.$$

Notasi :

TA = Penghindaran Pajak

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

Keterangan :

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Kepemilikan Institusional

β_2 = Koefisien Regresi Komite Audit

e = Error

4. Uji Hipotesis

- a. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *adjusted* R^2 yang kecil lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2013). Uji

F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *goodness of fit* statistik $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sebagai model penelitian belum tepat.
 2. Jika *goodness of fit* statistik $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.
- c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu :

1. Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikansi uji t $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat (dependen variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (independen variabel). Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional (KI), Komite Audit (KA) sebagai variabel independen, dan Penghindaran Pajak (TA) sebagai variabel dependen. Analisis deskriptif variabel disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	120	,0829	,9999	,660134	,2231890
KA	120	,5000	1,0000	,907639	,1482058
TA	120	,0210	,7133	,270047	,1166094

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 120 pengamatan, berdasarkan 4 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2013-2016), dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilai *mean*, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing-masing tabel yang diteliti. Nilai *mean* merupakan nilai yang menunjukkan besaran pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Kepemilikan Institusional memiliki *mean* sebesar 0,660134 dengan deviasi standar sebesar 0,2231890, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,0829 dan 0,9999. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel memiliki kepemilikan institusional yang relatif besar. Dengan kepemilikan institusional yang jumlahnya relatif besar dalam perusahaan maka mempengaruhi setiap keputusan yang diambil perusahaan seperti dalam hal melakukan penghindaran pajak perusahaan.
2. Komite Audit (KA) memiliki *mean* sebesar 0,907639 dengan deviasi standar sebesar 0,1482058, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,5000 dan 1,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel memiliki anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan yang cukup besar. Semakin besar jumlah komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan semakin efisien setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran

yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham.

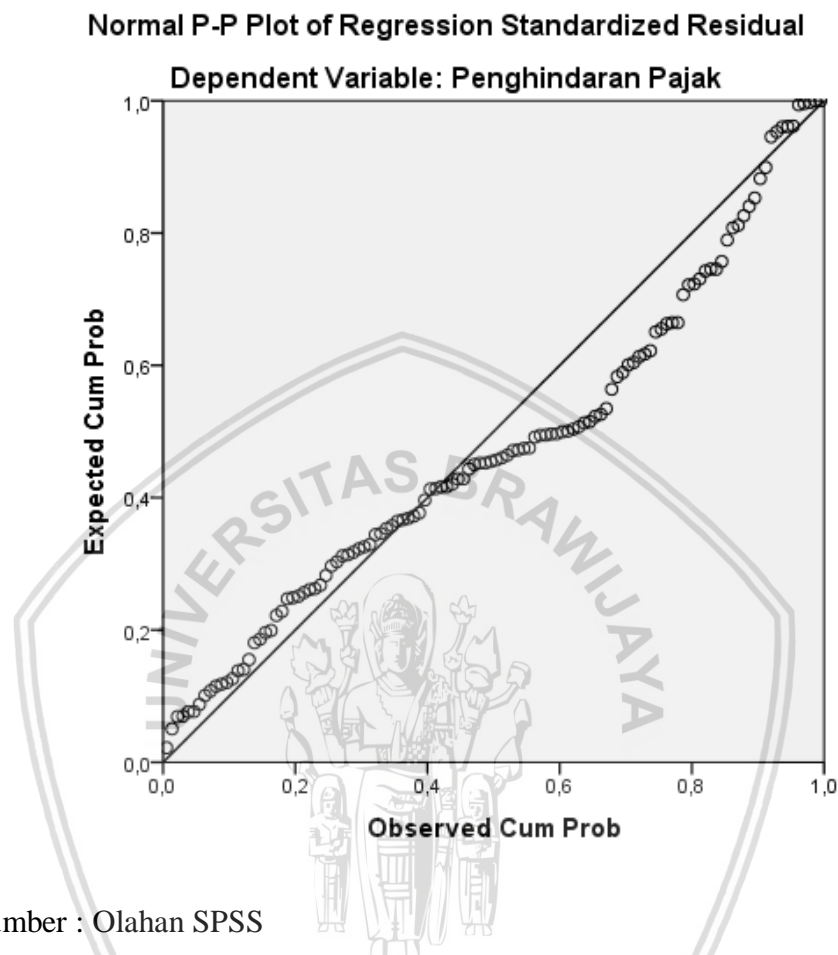
3. Penghindaran pajak (TA) memiliki *mean* sebesar 0,270047 dengan deviasi standar sebesar 0,1166094, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,0210 dan 0,7133. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang digunakan sebagai sampel memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat, dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik Histogram dan Normal P-P Plot dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik Normal P-P Plot disajikan dalam gambar 4.1 pada halaman berikutnya.

Gambar 4.1 Grafik P-Plots



Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Menunjukkan pola distribusi yang normal dan model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel independen dalam metode regresi. Multikolineritas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance*

Inflations Factors) atau nilai TOL (*Tolerance*). Seperti yang disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KI	,934	1,071
KA	,934	1,071

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflations Factors* (VIF) untuk KI sebesar 1,071 dan KA sebesar 1,071. Hasil perhitungan menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai *tolerance* tidak kurang dari 10% untuk KI sebesar 0,996 dan KA sebesar 0,996. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian (keseragaman data)

sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Pendeteksian adanya autokorelasi salah satunya dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai berikut:

- Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif
- Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

Nilai Durbin-Watson (DW) dari hasil perhitungan regresi disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Auto-Korelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	,140

a. Predictors: (Constant), KI, KA

b. Dependent Variable: TA

Sumber : Olahan SPSS

Hasil perhitungan Autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,140. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi karena terletak diantara -2 dan +2. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

Untuk menghindari nilai estimasi yang bias dalam model penelitian dan menghindari penafsiran yang keliru terhadap hasil penelitian, maka asumsi yang terlanggar harus dilakukan penanggulangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengubah variabel yang diteliti kedalam bentuk natural (log natural).

Tabel 4.4 Variabel Input

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KI, KA ^a	.	Enter

a. Dependent Variable: TA

b. All requested variables entered.

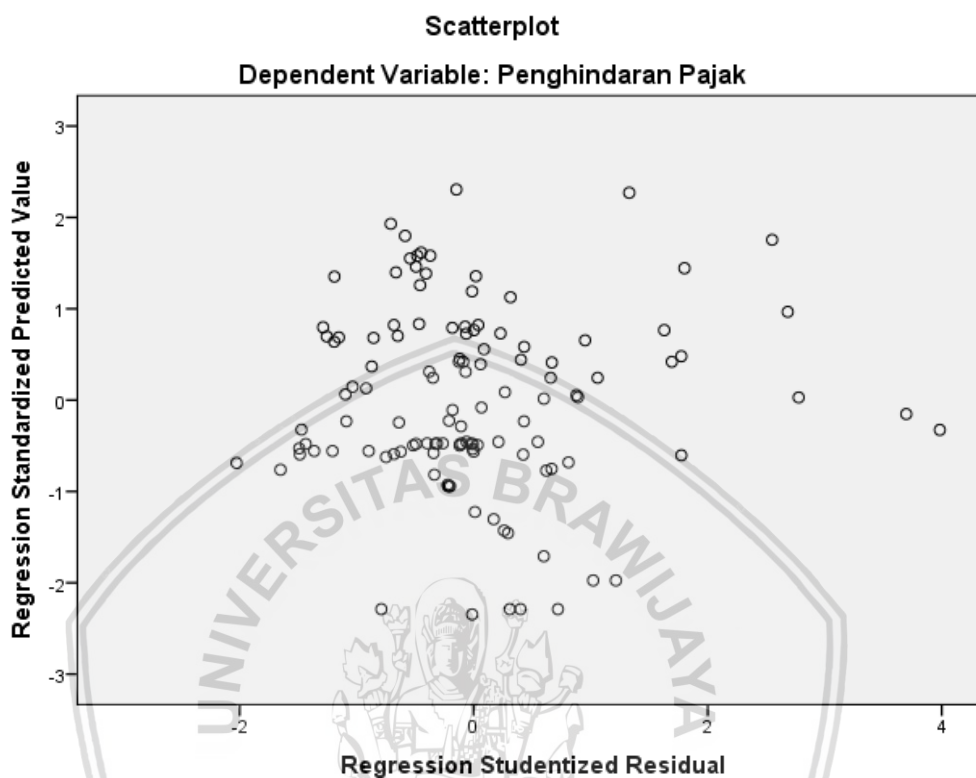
Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan (*removed*), atau dengan kata lain kedua variabel independen tersebut dimasukkan dalam perhitungan regresi, sehingga model regresi yang disajikan mempunyai auto-korelasi positif.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di unstandardized.

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot



Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan grafik *Scatterplot* yang dihasilkan SPSS terlihat hampir semua titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui penghindaran pajak perusahaan berdasar masukan dari variabel independennya.

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui dampak variabel

dependen dengan variabel independen. Hasil regresi menyajikan informasi mengenai signifikansi statistik dari variabel-variabel independen dan persamaan prediktif untuk penggunaan ke depan. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh Kepemilikan institusional (KI) dan Komite Audit (KA) terhadap penghindaran pajak perusahaan (TA) yang termasuk dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil estimasi koefisien regresi disajikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,275	,082		,001
	KI	,097	,049	,187	,047
	KA	-,076	,073	-,097	,299

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Olahan SPSS

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$TA = 0,275 + 0,97 KI - 0,076 KA + e$$

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI) memiliki koefisien sebesar 0,97 berarti bahwa perubahan kepemilikan institusional searah terhadap arah tindakan penghindaran pajak

perusahaan pada perusahaan perbankan, yang berarti bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka perilaku penghindaran pajak juga akan semakin meningkat.

Sedangkan komite audit (KA) memiliki koefisien negatif sebesar -0,076 berarti berarti bahwa perubahan komite audit tidak searah terhadap arah tindakan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan perbankan, yang berarti bahwa semakin besar komite audit maka perilaku penghindaran pajak juga akan semakin berkurang.

D. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Nilai adjusted R-Square yang diperoleh disajikan pada tabel 4.6 halaman berikutnya.

Tabel 4.6 Nilai Adjusted R-Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
				Estimate
1	,231 ^a	,054	,037	,1144123

a. Predictors: (Constant), KI, KA

b. Dependent Variable: TA

Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar ,037. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 3,7% variasi dari penghindaran pajak (TA) dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional (KI) dan Keuangan Komite Audit (KA) sedangkan sisanya sebesar 96,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis.

Pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *goodness of fit* statistik $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sebagai model penelitian belum tepat.
- b. Jika *goodness of fit* statistik $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

		Sum of				
Model		Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,087	2	,043	3,307	,040 ^b
	Residual	1,532	117	,013		
	Total	1,618	119			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), KI, KA

Sumber : Olahan SPSS

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,307 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040, karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga kesimpulannya model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan dalam penelitian. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tindakan penghindaran pajak perusahaan (TA).

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS tersaji pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,275	,082		3,371	,001
	KI	,097	,049	-,187	2,004	,047
	KA	-,076	,073	-,097	-1,043	,299

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Olahan SPSS

a. Kepemilikan Institusional

Untuk variabel kepemilikan Institusional diperoleh signifikansi t sebesar $0,047 < 0,05$ artinya bahwa variabel KI memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

b. Komite Audit

Untuk variabel komite audit diperoleh signifikansi t sebesar $0,299 > 0,05$ artinya bahwa variabel KA tidak memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variable komite audit tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Variabel Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga hipotesis H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi kepemilikan institusional, maka akan mempengaruhi kecenderungan melakukan penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Ini sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang menginginkan profit yang tinggi, sehingga pihak manajer harus meminimalkan pengeluaran dengan salah satu cara yaitu penghindaran pajak. Selain itu pemegang saham institusional memiliki hak suara dalam memberikan keputusan kepada manajer, sehingga dapat memaksa manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan pendapat bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa (2012) keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk

melakukan kebijakan pajak agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional.

Sesuai dengan pendapat Khurana (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang diungkapkan oleh Cahyono (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berlawanan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Oktofian (2015) mengatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Annisa (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Variabel Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga hipotesis H₂ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan, tidak akan mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Ini bisa terjadi diduga informasi-informasi yang diperoleh komite audit

kurang memadai, sehingga efektivitas komite audit menjadi berkurang. Selain itu bidang perpajakan juga begitu kompleks, sehingga keahlian akuntansi dan keuangan komite audit belum cukup untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pemahaman atau keahlian komite audit terhadap perpajakan mungkin akan dapat mempengaruhi efektivitas penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Pohan (2009), komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Hasil penelitian ini menolak yang menyatakan bahwa komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah berupa penghindaran pajak.

Penelitian juga ini sejalan dengan penelitian Anissa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan

negatif terhadap *tax avoidance*. Auditor yang berkualitas tinggi lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi praktik-praktik akuntansi yang meragukan dan melaporkan kekeliruan dan pelanggaran (*errors and irregularities*) dibandingkan dengan auditor dengan kualitas yang rendah. Karena auditor berkualitas tinggi memiliki keahlian, sumber daya, dan insentif untuk memisahkan komponen informasi dari *noise*, mereka dapat meningkatkan informasi akrual diskresioner dengan membatasi pelaporan akrual yang agresif dan oportunistik oleh manajer. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pemilihan auditor yang berkualitas menutupi tindakan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu caranya dengan meminimalkan pembayaran pajak. Maka dengan pemilihan auditor yang baik perusahaan dapat meyakinkan investor bahwa informasi yang dihasilkan reliabel, meskipun tidak semua tindakan manajemen yang dapat dideteksi oleh auditor.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Oktofian (2015) yang mengatakan bahwa proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurutny ada beberapa alasan komite audit dapat berpengaruh positif, jika semakin sedikit komite audit yang ahli dalam keuangan atau akuntansi maka pengendalian kebijakan yang dilakukan akan sangat minim, sehingga mengakibatkan peluang tindakan penghindaran pajak. Dan sebaliknya jika semakin banyak komite yang ahli dalam keuangan atau akuntansi maka

pengendalian kebijakan akan ketat sehingga meminimalkan tindakan penghindaran pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Sampel pada penelitian ini dilakukan pada 30 perusahaan dari 43 perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar atau meminimalkan pengeluaran kas dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, yang berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak karena jumlahnya yang relatif besar akan lebih mendominasi setiap keputusan yang diambil perusahaan.
2. Variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, yang berarti bahwa komite audit tidak mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan sebab bidang perpajakan membutuhkan keahlian akuntansi dan keuangan yang mendalam untuk memahaminya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan perbankan, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah sampel selain perusahaan perbankan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih keadaan yang sebenarnya.
2. Rentan waktu periode yang diteliti hanya 4 tahun, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentan waktu pengamatan, dikarenakan dengan periode yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang valid atau hasil yang mendekati sebenarnya.
3. Penelitian ini menghasilkan *Adjusted R Square* yang rendah yaitu 3,7%. Hal ini menunjukkan variabel dependen lebih banyak dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain di luar penelitian ini, misal kepemilikan manajerial, komisaris independen, kualitas audit dan beberapa variabel pengukur lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Annisa, N. A. dan Kurniasih, L. 2012, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No. 2, Mei 2012: 123-132.
- Boediono, Gideon. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- Cahyono, Deddy Dyas. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (Roa) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Damayanti, Fitri. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita dan Sari, Maria M. Ratna, 2015, *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance*. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi, 6(2), 249-260.
- Dyreng, Scott., Michelle Hanlon, and Edward L Maydew. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. *Tax Accounting Review*. 83. 61-82
- Effendi, Ima Puspita. 2017. *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawan, H. P. & Farahmita, A., 2012. *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia Volume 12.

- Khurana, Inder K. 2009. *Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness*. University of Missouri.
- Nandasari, E. A. 2016. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. 2017. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi, 18(3).
- Oktofian, Muhamad. 2015. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2009-2013*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pohan, H. T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, 4(2), 113-135.
- Reza, Faisal. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Solomon, Jill. 2010. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley and Sons Indeks.
- Santoso, T.B. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Journal of Accounting. Vol. 3 No.4. Hal.1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C. dan I.M. Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 10 (1): 47-62.
- Windiarti, Dwi Rynda. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Rasio Leverage Terhadap Nilai Perusahaan; Studi Pada Perusahaan Jasa Subsektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Unpas Bandung, Univeritas Pasundan.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Internet

Darussalam. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, Dan Anti Avoidance Rule*. Artikel Perpajakan. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6>. Diakses tanggal 1 Desember 2017.

Detik. *Ini Orang yang Bocorkan Aksi Penghindaran Pajak di HSBC*. <https://finance.detik.com/moneter/2839570/ini-orang-yang-bocorkan-aksi-penghindaran-pajak-di-hsbc>. Diakses pada 29 oktober 2017.

Kompas. *Mega Transfer Rp 19 Triliun Libatkan 81 WNI, 62 di Antaranya Ikut Tax Amnesty*. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/09/204606626/mega-transfer-rp-19-triliun-libatkan-81-wni-62-di-antaranya-ikut-tax-amnesty>. Diakses pada 15 oktober 2017.

Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

